

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Traktat NPT merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian multilateral tersebut dan bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan secara umum dan menyeluruh.<sup>1</sup>

Perjanjian Non-Proliferasi nuklir mengacu pada usaha-usaha untuk mencegah penyebab senjata-senjata nuklir ke Negara-negara yang belum memiliki sistem persenjataan nuklir. Oleh sebab itu, NPT merupakan kesepakatan pengendalian persenjataan yang paling luas dan diikuti oleh sebagian besar negara-negara didunia. Perjanjian ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi terciptanya perdamaian dunia. Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) ditandatangani pada 1 Juli 1968 di New York, Amerika Serikat oleh 43 negara dan mulai efektif dua tahun kemudian. Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, lebih dari 170 negara sepakat melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.<sup>2</sup> Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu : Nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

---

<sup>1</sup> Zaenudin, Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 81

<sup>2</sup> “Kitab Nuklir NPT” diakses dari <http://bataviase.co.id/node/189451>, pada 15 september 2011

Ada delapan negara yang telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir, lima diantaranya dianggap sebagai "negara yang boleh memiliki senjata nuklir" atau NWS (Nuclear Weapon State), sebuah status yang diberikan oleh Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) atau NPT. Kelima negara tersebut dalam urutan kepemilikan senjata nuklir adalah: Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, Perancis dan Republik Rakyat China.<sup>3</sup> Diluar kelima negara tersebut, ada tiga negara yang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu: India, Pakistan dan Korea Utara. Selain itu ada juga Israel. Israel walaupun tidak mengiyakan ataupun menyangkal memiliki senjata nuklir, tetapi Sebanyak 200 senjata nuklir pernah dilaporkan berada dalam persenjataannya. Keempat negara terakhir tadi tidak secara formal diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir karena bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Selain negara-negara diatas tersebut ada beberapa negara yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan nuklir. Salah satunya adalah Iran. Iran tercatat sebagai anggota *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sejak tahun 1958, dan telah menandatangani *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) di tahun 1970. Iran juga diyakini memiliki Program nuklir karena telah melakukan program nuklir sejak tahun 1974 dan Iran juga melakukan pengembangan teknologi pengayaan uranium untuk mengembangkan program Nuklir.

Berdasarkan ayat 3 pasal 8 NPT, konferensi revisi traktat NPT digelar setiap lima tahun sekali.<sup>4</sup> Konferensi revisi traktat NPT diperlukan untuk mengatur ulang

---

<sup>3</sup> "Daftar negara pemilik nuklir" diakses dari <http://www.forumbebas.com/thread-55795.html>, pada 15 september 2011

<sup>4</sup> "Pasang surut konferensi revisi NPT" diakses dari [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&id=21748:pasang-surut-konferensi-revisi-npt&catid=59:perspektif&Itemid=101](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=21748:pasang-surut-konferensi-revisi-npt&catid=59:perspektif&Itemid=101), pada 16 september 2011

penyebarluasan senjata nuklir di seluruh dunia. Konferensi Revisi NPT ini berfokus pada langkah-langkah negara-negara anggota dalam konferensi yang memiliki senjata nuklir untuk melucuti senjata nuklir.

Sesuai aturan itu, Konferensi revisi NPT hingga kini telah dilangsungkan delapan kali. Konferensi Pertama revisi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1975 dengan kehadiran 91 negara anggota. Konferensi itu digelar di tengah meningkatnya perlombaan senjata dan antariksa antara AS dan Uni Soviet.<sup>5</sup> Konferensi Kedua revisi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1980. Sidang ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya mengingat peningkatan friksi diplomatik antara AS dan Uni Soviet, sampai-sampai konferensi gagal mengeluarkan deklarasi akhir.

Konferensi Ketiga revisi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dibuka pada Mei 1985 dengan kehadiran 131 negara anggota. Uji coba nuklir rezim Zionis Israel di Atlantik Selatan membuat negara-negara Arab dan Islam ragu terhadap ide menciptakan Timur Tengah sebagai zona bebas nuklir yang diusulkan Iran kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada tahun 1974.<sup>6</sup>Keamanan nuklir juga menjadi agenda konferensi 1985. Pada konferensi keempat pada tahun 1990, jumlah anggota NPT mencapai 140 negara. Dalam pertemuan itu, Cina dan Perancis hadir sebagai peninjau. Sidang itu kembali gagal mengeluarkan deklarasi akhir tentang mekanisme keamanan nuklir dunia.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

Konferensi Kelima Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 1995 dengan jumlah anggota NPT sebanyak 178 negara. Pertemuan dilangsungkan di tengah hancurnya struktur sistem dua kutub setelah Perang Dingin. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.<sup>7</sup> Akan tetapi, hasil final konferensi itu adalah kesepakatan untuk meratifikasi sebuah protokol bagi peningkatan keamanan dan pengawasan nuklir atau lebih dikenal dengan protokol tambahan. Pada tahun 1996, negara-negara anggota NPT menandatangani protokol tambahan. Waktu itu, aturan tambahan ini menargetkan seluruh negara anggota NPT bergabung bersamanya pada akhir tahun 2005. Protokol tambahan memberi kewenangan luas kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk kegiatan inspeksi terhadap instalasi nuklir negara-negara anggota.

Konferensi Keenam Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) digelar pada Mei 2000 dengan kehadiran 187 negara anggota. Sidang ini merupakan pertemuan pertama revisi NPT setelah perpanjangan tanpa batas pada tahun 1995.<sup>8</sup> Agenda konferensi ini antara lain membahas masalah implementasi pasal-pasal NPT dan keputusan-keputusan pertemuan sebelumnya. Selain itu, negara-negara anggota NPT juga mengkritik Doktrin Nuklir AS. Doktrin ini lebih mengarah pada produksi dan penggunaan senjata atom ketimbang perlucutan dan pengurangan senjata pembunuh massal itu. Mulai tahun 2000, AS mulai mereaksi kritikan global itu dan melancarkan kebijakan represif terhadap Konferensi Revisi NPT. Agenda pemerintah AS terfokus

---

<sup>7</sup> “Konferensi NPT” diakses dari <http://forum.detik.com/showthread.php?t=183987&page=2>, pada 16 september 2011

<sup>8</sup> *Ibid*

pada masalah nuklir Republik Islam Iran dan Korea Utara dan mulai mengambil kebijakan keras.

Konferensi revisi NPT ketujuh yang dilakukan Mei 2005 berakhir tanpa arah yang jelas dan tanpa adanya perjanjian dari negara peserta. Israel, yang dipercaya secara luas memiliki persenjataan nuklir yang cukup besar, menolak menandatangani NPT yang didukung secara jelas oleh Amerika Serikat. Sebaliknya justru menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Hal ini menjadi titik balik bagi Negara-negara yang memanfaatkan teknologi nuklir tujuan damai seperti Republik Islam Iran untuk mengkritik balas perlakuan dari Negara barat.

Setelah mempelajari sejarah panjang konferensi revisi NPT, pertemuan-pertemuan sebelumnya hingga kini hanya memperjuangkan dalam hal penambahan jumlah anggota. Sementara dari sisi kualitas belum mampu merealisasikan target-target minimal. Untuk itu, PBB menggelar Konferensi Peninjauan Kembali NPT kedelapan yang dibuka pada 3 Mei 2010 di PBB. Tujuan dari konferensi ini adalah tercapainya konsensus yang bisa menjadi pegangan untuk konferensi lima tahun kedepan.

Selama ini, Proses pelaksanaan atau penerapan NPT terganjal oleh perdebatan antara negara-negara Barat dan negara-negara berkembang. Bagi Barat dan negara besar, program nuklir Iran dan Korea Utara yang menyebabkan NPT tidak efektif. Namun bagi beberapa negara berkembang seperti Iran, kegagalan negara besar untuk melucuti senjata nuklirnya yang patut disalahkan.

Iran sebagai salah satu Negara Anggota Traktat NPT menilai perjanjian anti-penyebarluasan senjata nuklir atau Non-proliferation Treaty (NPT) telah gagal. Iran

yang memanfaatkan teknologi nuklir untuk keperluan damai malah dituduh mengembangkan senjata nuklir dan telah melanggar. Iran menolak tuduhan yang diberikan karena Iran mempunyai hak untuk memperkaya uranium dengan tujuan damai dibawah pengawasan dan berdasarkan NPT dan statuta Badan Energi dan Atom Internasional (IAEA). Iran juga menyatakan bahwa program pengayaan merupakan bagian dari program energi nuklir sipil, yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian NPT.

Iran beranggapan kini perlucutan senjata nuklir telah menjadi kebijakan sukarela, sementara pemanfaatan teknologi nuklir damai menjadi kebijakan monopoli dan hak milik segelintir negara. Walaupun banyak negara tidak sependapat dengan Iran seperti usulan perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir bagi negara-negara yang memiliki program nuklir seperti Amerika Serikat. AS di satu sisi menyetir konferensi ke arah peningkatan monopoli dan membatasi negara-negara lain memperoleh teknologi nuklir daripada memperjuangkan perlucutan senjata nuklir. Menilik dari kegagalan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dimana tidak menemui kesepakatan, di konferensi kedelapan ini Iran akan mengajukan usulan perubahan Traktat NPT dimana usulan-usulan perubahan yang diajukan Iran dalam revisi traktat NPT bertujuan untuk mencapai kepentingannya.

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bahasan yang akan dibahas dalam pertemuan Konferensi Peninjauan kembali NPT tersebut.
2. Untuk mengetahui apa kepentingan Iran di dalam Konferensi revisi NPT tersebut.
3. Untuk mengetahui hasil dari pertemuan tersebut negara-negara peserta Konferensi Peninjauan kembali NPT tersebut.

## **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan urutan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu:

“Apa saja kepentingan Iran di Konferensi Peninjauan Ulang NPT kedelapan di PBB?”

## **D. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan Nasional ( national interest ) ini, dapat didefinisikan sebagai tujuan dasar suatu faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat

vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, Prestige, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada “ interest” secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap sebagai “ national interest”. Manakala setiap negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara utuh atau tidak sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka kebijakan tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijakan realistik. Merujuk pada pendapat Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

*“Foreign policy as a strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest”.*<sup>9</sup>

*“(Politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara didalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang bertujuan mencapai kepentingan nasional).”*

Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri, dimana untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan. Kebijakan dalam negeri menekankan dalam hubungan dan kepentingan antara pemerintah dan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri atau orientasi luar negeri merupakan sikap dan komitmen untuk suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamental

---

<sup>9</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, “*The International Relation Dictionary*”, Holt, Rinehart & Winstone, USA, 1997, hal.127



untuk mencapai tujuan dalam dan luar negeri dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan guna terwujudnya kepentingan nasional suatu negara.<sup>10</sup>

Menurut Morgenthau dalam Mas'ood, kepentingan nasional setiap Negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Sementara Plano dan Orton menerangkan kepentingan nasional adalah tujuan dasar dan penentu yang menuntun pemimpin Negara dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Biasanya kepentingan nasional mencerminkan kebutuhan vital yang dituntut oleh suatu Negara.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional dari seluruh sistem nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara untuk melaksanakan politik luar negeri, dimana negara tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategis untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara.<sup>11</sup>

Kepentingan nasional tetap sangat penting bagi setiap usaha untuk menerangkan, menjelaskan, meramalkan atau membuat preskripsi mengenai perilaku internasional. Politik suatu Negara tidak bisa lepas dari kepentingan nasional, karena tujuan politik adalah mempertahankan kepentingan nasional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> KJ Holsty terjemahan M Tahir Azhari. "*Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa*", jilid I, Jakarta, Erlangga, 1998. Hal 108

<sup>11</sup> Dahlan Nasution, "*Konsep Politik Internasional*", Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 32

<sup>12</sup> Charles O, Lerche. J.R, Abdul Said, *Concept of International Politics*, Prentice Hall, New Jersey Inc, Englewood Cliffs, 1963, hal. 9-12

Adapun sasaran dari kepentingan nasional menurut Charles O, Lerche dan Abdul A. Said yaitu:

“.....*self preservation (on the collective entity of the state and its human and territorial manifestation), security, well being, prestige, power, the promotion and or protection of ideology or any other as defined synthesized and given form by the decision makers of the country is considered as the general, long term, in continuing purpose which the state, the nation and government all see themselves as serving.*”<sup>13</sup>

“.....*Mempertahankan diri (usaha untuk menjaga kesatuan negara, manusia, (warganya) dan wilayah territorial), keamanan, kesejahteraan, status, kekuasaan, promosi, atau (perlindungan ideology dan lain sebagainya seperti yang sudah terdefiniskan atau sintesakan) dan bentuk yang sudah diciptakan oleh para pembuat keputusan Negara yang dianggap umum, berjangka panjang, memiliki tujuan tertentu dimana Negara, bangsa dan pemerintah menganggap semua ini sebagai fungsi pelayanan.*”

Secara Konseptual *Self-Preservation* adalah kelangsungan hidup suatu negara yang memiliki konsep kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempertahankan diri agar negara-negara yang memiliki *power* yang besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan. Dalam perspektif *Self Preservation*, apabila kedaulatan Nasional suatu negara mendapat ancaman atau dapat membahayakan eksistensinya sebagai sebuah negara, maka negara yang bersangkutan dianggap dapat bertindak apa saja dengan cara apa saja tetapi tetap menurut hukum Internasional. *Prestige* (Status) artinya keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. *Security* artinya kepentingan nasional yang bertujuan untuk menjaga negara dari kekuasaan militer negara lainnya. *Well-being* (*kesejahteraan*) Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.

---

<sup>13</sup> Ibid.

Dari konsep diatas dapat diidentifikasi bahwa tujuan atau kepentingan nasional Iran adalah untuk Kedaulatan Nasional dan Independensi Negara dan juga untuk status atau prestige.

#### **A. Konsep Kedaulatan Nasional dan Independensi Negara**

Negara merdeka adalah negara yang berdaulat, yaitu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi pada organ negara itu sendiri. Esensi dari kedaulatan adalah adanya kekuasaan untuk menentukan tujuan dan cita-cita sendiri, serta mengelola sumber daya sendiri, serta memilih dan menentukan jalan sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Tanpa itu semua, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itulah kedaulatan menjadi unsur konstitutif suatu negara

Hal ini terjadi karena tak ada satu negara pun patut menyerahkan masalah kepentingan nasionalnya yaitu Kedaulatan Nasional dan Independensi Negara kepada pihak asing. Dan dalam konteks ini pula, masalah pendayagunaan teknologi nuklir menjadi sangat krusial bagi Iran ketika negara ini harus memenuhi kebutuhannya kepada perkembangan di pelbagai bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Pada masa mendatang, teknologi nuklir akan menggeser posisi bahan bakar fosil untuk memenuhi keperluan energi dunia. Kini pun, banyak negara yang sudah menyiapkan diri dengan menambah jumlah instalasi nuklirnya. Industri nuklir dinilai sangat krusial mengingat teknologi nuklir melingkupi 200 bidang industri dan 500 kajian saintifik.

Sampai saat ini, Barat berupaya mencegah keberhasilan Iran di bidang nuklir. Dalam menindaklanjuti kasus nuklir Iran, Barat sama sekali tidak menggunakan

parameter dalam NPT maupun IAEA, melainkan menggunakan cara-cara arogan. Bahkan, Barat tak segan-segan bertindak di luar aturan internasional. Secara keseluruhan, Barat menerapkan standar ganda dalam kasus nuklir Iran. Sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, Barat mendukung pembangunan instalasi nuklir di Iran. Namun, pasca kemenangan Revolusi Islam Iran, Barat justru menentang pembangunan instalasi tersebut. Meski aktivitas nuklir Iran diawas oleh IAEA dan tidak menyeleweng dari NPT, Barat selalu menunjukkan interferensi terhadap program nuklir Iran, dan di saat yang sama, Barat menjalin kerjasama nuklir dengan negara-negara lain termasuk India dan Pakistan yang justru bukan anggota NPT. Bahkan dalam kasus nuklir Rezim Zionis, Barat memberikan berbagai bantuan kepada Tel Aviv.

Barat juga tidak menunjukkan reaksinya atas aktivitas nuklir Rezim Zionis yang telah memproduksi 200 hulu ledak nuklir, atau aktivitas nuklir Korea Selatan yang diam-diam telah menghasilkan pengayaan plutonium hingga 90 persen. Sedangkan terhadap program nuklir Iran, sikap Barat cenderung arogan. Jangankan soal reaktor nuklir, terhadap pembangunan reaktor listrik air ringan di Iran Barat pun Barat masih juga menentang. Barat menolak melanjutkan pembangunan dua reaktor nuklir di Iran yang prosesnya dimulai sejak sebelum kemenangan Revolusi dan sudah mencapai 60 persen. Tidak hanya itu, mereka juga mencegah negara-negara lain termasuk Rusia melanjutkan proyek tersebut.

Dualisme tersebut menunjukkan kentalnya fenomena rasisme dalam politik Barat. Di saat 50 ton uranium milik Iran disita dan disimpan di gudang-gudang di Jerman, serta 10 persen saham milik Iran di perusahaan pengayaan uranium Perancis

dibekukan, Inggris dan Perancis malah memberikan bantuan teknologi nuklir secara ilegal kepada Rezim Zionis.<sup>14</sup>

Karena Iran beranggapan adanya diskriminasi terhadap program teknologi Iran sehingga Iran mengusulkan di Konferensi Revisi NPT ke delapan di PBB agar mendapat perlakuan yang sama dengan negara anggota NPT lainnya.

### **B. Konsep Status (Prestige)**

Dalam hal ini status yang dimaksud adalah status dari Iran dengan negara-negara lain. Dimana status negara saat ini tidak hanya dinilai dari kekuatan militer suatu negara saja tetapi peningkatan status negara juga dinilai dari tingkat peradaban bangsa itu sendiri. Teknologi nuklir berhasil diraih Iran berkat teguhnya kepercayaan para pejabat dan ilmuwan nuklir negara ini kepada potensi, kemampuan dan jerih payah mereka. Semua prestasi itu terus dipelihara dengan dukungan rakyat dan manajemen para pejabat Iran. Keteguhan dan resistensi rakyat Iran di depan tekanan asing diakui sebagai faktor utama terpeliharanya semua prestasi itu. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya di bidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Resistensi dilakukan baik pada tahap pengupayaan dan pencapaian teknologi nuklir maupun pada tahap pengembangannya. Kemajuan pesat berhasil ditunjukkan Iran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan para ilmuwan negara ini dalam memproduksi bahan bakar nuklir untuk skala industri.

---

<sup>14</sup> “*Resistensi Nuklir*” diakses dari <http://www2.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/resistensi.htm>, pada 16 september 2011

Seperti diketahui, independensi dan kemajuan sebuah bangsa sangat bergantung kepada keberhasilannya dalam meraih kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selama Iran diperintah oleh penguasa yang diktatoris serta sangat bergantung kepada Barat dalam segala hal, bisa dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Iran mengalami stagnasi yang sangat parah selama hampir dua abad. Untuk itulah setelah berhasil meraih kemenangan dalam revolusi, Iran kemudian bertekad kuat meraih keberhasilan lain di bidang ilmu pengetahuan terutama kemajuan di bidang teknologi nuklir demi menjamin masa depan bangsa ini sekaligus mengejar berbagai ketertinggalan di bidang ini.

#### **E. Hipotesa**

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan didukung oleh teori yang dianggap dapat membantu analisa, maka penulis akhirnya sampai pada hipotesa bahwa kepentingan Iran di Konferensi Revisi NPT di PBB pada 3 mei 2010 adalah:

- a. Iran ingin haknya sebagai negara yang boleh mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai diakui oleh negara anggota NPT lainnya.
- b. Iran ingin menunjukkan kepada negara lainnya bahwa Iran meraih kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern terkait program nuklirnya.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah melakukan analisa, penelitian ini mengkaji kepentingan Iran dalam Konferensi peninjauan Ulang Traktat NPT di PBB.

Jangkauan penulisan dalam penulisan ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 yang merupakan tahun dimana Konferensi Peninjauan Ulang Traktat NPT di PBB diselenggarakan. Tidak menutup kemungkinan menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tahun-tahun tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Data yang diperoleh dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan, dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah

Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan:

- Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literature yang relevan, surat kabar, dan internet.

Dari beberapa langkah dan pertimbangan itulah penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan dibahas lebih lanjut lagi dalam tulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah yaitu, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Jangkauan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Membahas Tentang Program Nuklir Iran dari awal mula perkembangan hingga perkembangan sekarang dan alasan Iran mengembangkan program nuklir.

BAB III : Membahas tentang Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Konferensi Peninjauan Ulang NPT dan penerapan NPT terhadap Iran

BAB IV : Membahas tentang kepentingan Iran dalam Konferensi Peninjauan Ulang Traktat NPT kedelapan di PBB.

BAB V : Mengemukakan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.